

## Pemuda Penyandang Disabilitas: *The Ones Left Behind?* *Youth with Disabilities: The Ones Left Behind?*

Freshy Windy Rosmala Dewi<sup>1</sup>

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia,

Jalan Dokter Soetomo No 6-8 Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta,

Telp: (021) 3841195, Fax: (021) 3857046,

Email: [freshy.windy@bps.go.id](mailto:freshy.windy@bps.go.id), HP: 085704085385

Naskah diterima 7 November 2019, diperbaiki 19 Maret 2020, disetujui 4 April 2020

### **Abstract**

*As SDGs principle: No One Left Behind, more attention should be given to vulnerable and marginalized groups, such as youth with disabilities. Youth development is an important investment to a nation. Indonesia uses Youth Development Index (YDI) to measure the youth development progress. YDI for Indonesia has been calculated since 2015. However, this index is not specifically calculated for youth with disabilities yet. Therefore, this paper aims to know how youth development for those with disabilities compared to those without disabilities is. YDI consists of 15 indicators in 5 dimensions: Education, Health and Well-being, Job Opportunity, Participation and Leadership, as well as Gender and Discrimination. Each indicator is standardized using scoring method and each dimension is equally weighted. It is found that all of the dimensions for youth with disabilities is lower than those without disabilities causing YDI 2018 for youth with disabilities (30.50) is far behind compared to those without disabilities (52.00). Dimension with the lowest index and has the highest gap between youth with disabilities and those without disabilities is Job Opportunity. The YDI gaps for youth with disabilities vary across provinces. The main issue of this paper is the use of aggregation data for two indicators in Health and Well-being dimension. It is strongly recommended to calculate these indicators by disability status in the future.*

**Keywords:** *Youth Development Index; job opportunity; gap*

### **Abstrak**

Sejalan dengan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yakni *No one left behind*, perhatian lebih harus diberikan kepada kelompok rentan dan termarginalkan, salah satunya pemuda penyandang disabilitas. Pembangunan pemuda adalah investasi yang amat berharga bagi bangsa. Capaian pembangunan pemuda di Indonesia diukur dengan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). IPP Indonesia sudah dihitung sejak tahun 2015. Sayangnya, indeks tersebut belum fokus pada pemuda penyandang disabilitas. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah melihat capaian pembangunan pemuda penyandang disabilitas dibandingkan dengan bukan penyandang disabilitas. IPP terdiri dari 15 indikator dalam 5 dimensi, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Setiap indikator distandarasi menggunakan metode skor dan setiap dimensi diberi bobot yang sama. Hasilnya, indeks kelima dimensi kelompok penyandang disabilitas berada di bawah kelompok bukan penyandang disabilitas yang membuat IPP penyandang disabilitas (30,50) cukup jauh tertinggal dibandingkan bukan penyandang disabilitas (52,00). Dimensi dengan nilai indeks terendah yang juga memiliki *gap* terjauh dengan indeks dimensi bukan penyandang disabilitas adalah lapangan dan kesempatan kerja. *Gap* antara IPP penyandang disabilitas dengan bukan penyandang disabilitas pun bervariasi antar provinsi. Penelitian ini masih menggunakan angka nasional untuk dua indikator pada dimensi kesehatan dan kesejahteraan. Kedepannya, sangat disarankan untuk menghitung indikator tersebut menurut status disabilitas.

**Kata Kunci:** *Indeks Pembangunan Pemuda; lapangan dan kesempatan kerja; gap*

### **A. Pendahuluan**

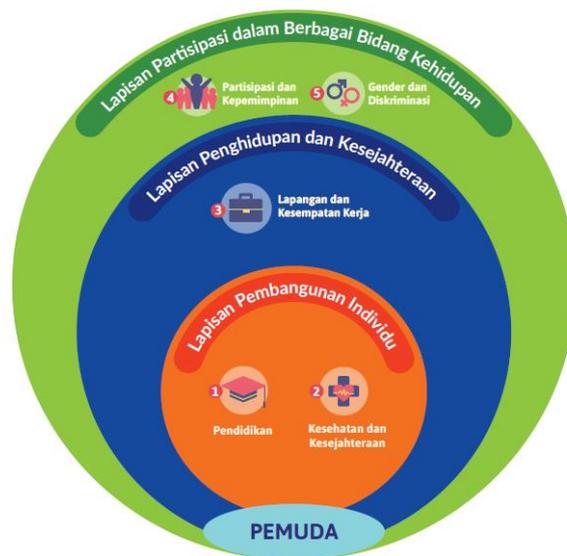
Fokus utama pembangunan dunia saat ini adalah pemerataan atau kesetaraan. Hal ini terlihat dari prinsip yang diusung dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

yaitu: *No One Left Behind* (UNDP, 2018). Artinya, negara-negara di dunia sepakat untuk mengakhiri segala macam bentuk ketimpangan dengan fokus pada kelompok rentan atau yang termarginalkan sebagai sasaran utama

pembangunan (UN Foundation, 2016). Adapun kelompok rentan yang dimaksud adalah perempuan, penduduk di perdesaan, etnik minoritas, migran, pemuda dan penduduk lanjut usia, serta penduduk penyandang disabilitas (UNDP, 2018). Pemuda merupakan kelompok rentan karena kelompok ini sering kali terlupakan dalam program pembangunan yang mana lebih sering fokus pada kelompok umur lain seperti penduduk lanjut usia, bayi, atau anak (Offerdahl dkk, 2014). Kondisi demikian membuat pemuda penyandang disabilitas menjadi kelompok yang mengalami kerugian ganda. Mereka menghadapi marjinalisasi dan kesenjangan sosial maupun ekonomi yang parah dibandingkan dengan pemuda bukan penyandang disabilitas karena berbagai faktor, mulai dari stigma masyarakat hingga aksesibilitas lingkungan yang tidak mendukung karena keterbatasan fisiknya (UNDESA, 2019).

Pemuda adalah masa depan bangsa, dan investasi dalam pembangunan pemuda adalah investasi yang amat berharga bagi bangsa (Bappenas, 2017). Pemerintah Indonesia telah melibatkan pemuda dalam program pembangunan yang dibuktikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Dalam Undang Undang tersebut dinyatakan bahwa pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan untuk segala aspek kehidupan. Untuk menentukan capaian pemerintah dalam pembangunan, diperlukan suatu ukuran kuantitatif (Bappenas, 2009). Dalam konteks pembangunan pemuda, ukuran yang digunakan di Indonesia adalah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), yang mana merupakan indeks komposit karena capaian pembangunan pemuda tidak hanya dilihat dari satu aspek saja. IPP Indonesia dibangun dengan memperhatikan aspek-aspek akademis, teknokratis, dan juga berbasis legitimasi. Secara akademis, IPP mengikuti aturan metodologi yang ketat dan terstandarisasi. Secara teknokratis, indeks ini mempertimbangkan target-target pemerintah dalam pembangunan pemuda. Dan untuk memberi basis legitimasi pada indeks ini, IPP disusun juga melalui serangkaian konsultasi dengan pemangku kepentingan di tingkat

pemerintah dan nonpemerintah, utamanya pemuda (Bappenas, 2017). Dari proses yang panjang tersebut, dihasilkan kerangka kerja IPP untuk Indonesia seperti pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1: Kerangka Kerja Indeks Pembangunan Pemuda di Indonesia

Pembangunan pemuda dapat ditelisik melalui tiga lapisan, yakni pengembangan individu, pengembangan penghidupan, serta pengembangan partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam lapisan pengembangan individu, IPP menyertakan ‘pendidikan’ serta ‘kesehatan dan kesejahteraan’ sebagai dimensinya. Sementara itu, dalam lapisan pengembangan penghidupan, IPP memasukkan ‘lapangan dan kesempatan kerja’ sebagai dimensi berikutnya. Selanjutnya adalah pengembangan partisipasi, yang di dalamnya IPP mempertimbangkan ‘partisipasi dan kepemimpinan’ serta ‘gender dan diskriminasi’ sebagai dua dimensi terakhir.

Meskipun IPP Indonesia secara resmi sudah dihasilkan, sayangnya IPP yang ada hanya memotret pemuda secara umum pada level nasional dan provinsi, dan belum ada penelitian secara khusus yang melihat kesetaraan pembangunan pemuda antara penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana capaian pembangunan pemuda penyandang disabilitas

jika dibandingkan dengan bukan penyandang disabilitas, pada level nasional dan provinsi.

## B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan riset dengan pendekatan kuantitatif, yakni penghitungan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai ukuran untuk melihat sejauh mana capaian dalam pembangunan pemuda di Indonesia tahun 2018, yang didisegregasikan menurut status disabilitas. Indeks dihitung dengan mengacu pada dimensi dan indikator yang digunakan dalam penghitungan IPP di Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, IPP terdiri dari lima dimensi, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Sebanyak 15 indikator dapat memberikan gambaran lengkap tentang pembangunan pemuda tersebar ke lima dimensi tersebut (Bappenas, 2017). Sumber data untuk indikator-indikator tersebut

diperoleh dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor, Susenas Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan (MSBP), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang merupakan survei dalam skala nasional sehingga estimasi dapat dilakukan pada level provinsi. Keempat sumber data tersebut memiliki periode survei yang sama, yaitu tahun 2018. Adapun penjelasan untuk indikator-indikator dan sumber data tersebut secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 1.

Setiap indikator dihitung berdasarkan disegregasi status disabilitas, yaitu penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas. Status disabilitas dalam penelitian ini mengacu pada konsep dan definisi disabilitas yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, yang mana mengadopsi pertanyaan dari *Washington Group on Disability Statistics*. Seseorang termasuk dalam penyandang disabilitas apabila mengalami satu atau lebih gangguan/kesulitan sebagai berikut: 1) Sama sekali tidak bisa atau banyak

Tabel 1: Daftar Indikator Indeks Pembangunan Pemuda

Dimensi	Indikator	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Arah Indikator	Sumber Data
Pendidikan	Rata-rata lama sekolah pemuda (tahun)	0	15	Positif	Susenas Kor 2018
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP dan SM (persen)	0	100	Positif	Susenas Kor 2018
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (persen)	0	100	Positif	Susenas Kor 2018
Kesehatan dan Kesejahteraan	Angka kesakitan pemuda (persen)	20	0	Negatif	Susenas Kor 2018
	Persentase pemuda korban kejahatan (persen)	3	0	Negatif	Susenas Kor 2018
	Persentase pemuda merokok (persen)	36	0	Negatif	Riskesdas 2018
	Persentase remaja perempuan sedang hamil (persen)	45	0	Negatif	Riskesdas 2018
Lapangan dan Kesempatan Kerja	Persentase pemuda berusaha dengan jenis jabatan kerah putih (persen)	0	2	Positif	Sakernas Agustus 2018
	Tingkat pengangguran terbuka pemuda (persen)	28	0	Negatif	Sakernas Agustus 2018
Partisipasi dan Kepemimpinan	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (persen)	0	100	Positif	Susenas MSBP 2018
	Persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi (persen)	0	45	Positif	Susenas MSBP 2108
	Persentase pemuda yang memberikan saran dalam rapat (persen)	0	25	Positif	Susenas MSBP 2018
Gender dan Diskriminasi	Persentase perkawinan usia anak pada pemuda perempuan (persen)	33	0	Negatif	Susenas Kor 2018
	Persentase pemuda perempuan yang sedang bersekolah SMA ke atas (persen)	25	100	Positif	Susenas Kor 2018
	Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal (persen)	0	60	Positif	Sakernas Agustus 2018

Sumber: Bappenas, 2017

mengalami kesulitan melihat; 2) Sama sekali tidak bisa atau banyak mengalami kesulitan mendengar; 3) Sama sekali tidak bisa atau banyak mengalami kesulitan berjalan atau naik tangga; 4) Sama sekali tidak bisa atau banyak mengalami kesulitan menggunakan/menggerakkan tangan/jari; 5) Sama sekali tidak bisa atau banyak mengalami kesulitan mengingat atau berkonsentrasi; 6) Sama sekali tidak bisa atau banyak mengalami gangguan perilaku dan/atau emosional; 7) Sama sekali tidak bisa atau banyak mengalami kesulitan berbicara dan/atau memahami/berkomunikasi dengan orang lain; 8) Sama sekali tidak bisa atau banyak mengalami kesulitan dalam mengurus diri sendiri.

Dalam menghitung indeks, setiap indikator harus memiliki *range*, satuan, dan arah yang sama. Untuk itu, semua indikator terlebih dahulu distandarisasi. Tahapan yang paling penting dalam proses standarisasi adalah penentuan batas maksimal dan minimal untuk setiap indikator. Untuk indikator rata-rata lama sekolah, batas maksimal yang digunakan mengacu pada standar yang sudah ditentukan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan digunakan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Batas maksimal indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda diambil dari TPT pemuda tertinggi di dunia pada tahun 2015, yaitu Arab Saudi. Selain kedua indikator tersebut, batas maksimal indikator lainnya didasarkan atas sebaran data dan pendapat para pakar (Bappenas, 2017).

Standarisasi dalam IPP menggunakan metode pemberian skor atau peringkat. Penghitungan skor masing-masing indikator dilakukan berdasarkan batas maksimum dan minimum dari masing-masing indikator, yang telah ditetapkan sebelumnya. Skor terendah diberi nilai 1 dan tertinggi adalah 10. Untuk indikator yang bersifat positif, semakin tinggi nilai indikator maka akan semakin tinggi nilai skornya. Sedangkan indikator bersifat negatif berlaku sebaliknya.

Tahap berikutnya adalah menghitung indeks dimensi untuk tiap kelompok (penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas). Indeks masing-

masing dimensi dihitung dengan rumus rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Indeks Dimensi}_i = \left( \frac{\text{score } X_1 + \dots + \text{score } X_{n_i}}{n_i} \right) \quad (1)$$

dimana  $n_i$  adalah banyaknya indikator dalam suatu dimensi (Bappenas, 2017).

IPP Indonesia dihitung dengan menggunakan metode pembobotan yang sama (*equal weighting*) untuk setiap dimensi karena setiap aspek pembangunan pemuda di Indonesia (dalam hal ini kelima dimensi) dianggap sama pentingnya (Bappenas, 2017). Dengan demikian, IPP untuk tiap kelompok disagregasi dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{IPP} = \left( \frac{\text{Indeks Dimensi 1} + \dots + \text{Indeks Dimensi 5}}{5} \right) \quad (2)$$

Untuk melihat seberapa jauh perbedaan capaian IPP tiap provinsi antara kelompok penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas, maka dilakukan analisis *gap* dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Disability Gap in IPP}_{\text{Province} - j} = \left( \frac{\text{IPP Non Dis}_j - \text{IPP Dis}_j}{\text{IPP Non Dis}_j} \right) \times 100 \quad (3)$$

Semakin besar *gap* mengindikasikan semakin tertinggalnya pembangunan pemuda penyandang disabilitas di suatu provinsi dibandingkan bukan penyandang disabilitas (Han dkk, 2017).

Hasil penghitungan indeks disajikan dalam bentuk grafik dan tabel dan dilakukan analisis secara deskriptif. Untuk mendukung analisis deskriptif tersebut, dilakukan analisis inferensia sederhana dengan menggunakan rasio kecenderungan (*odds ratio*) sebagai berikut:

$$\text{OR} = \left( \frac{a/c}{b/d} \right) = \left( \frac{a \times d}{b \times c} \right) \quad (4)$$

dimana:

a = jumlah amatan yang mengalami kejadian

b = jumlah amatan yang tidak mengalami kejadian

c = jumlah di luar amatan yang mengalami kejadian

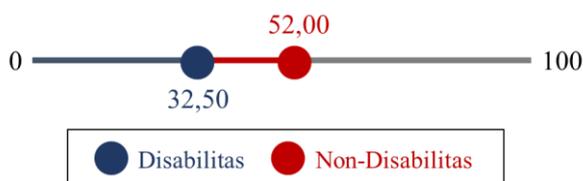
d = jumlah di luar amatan yang tidak mengalami kejadian

*Odds ratio* memberikan gambaran mengenai seberapa besar kecenderungan sekelompok

amanat untuk mengalami suatu kejadian dibandingkan kelompok bukan amatan mengalami kejadian tersebut (Szumilas, 2010).

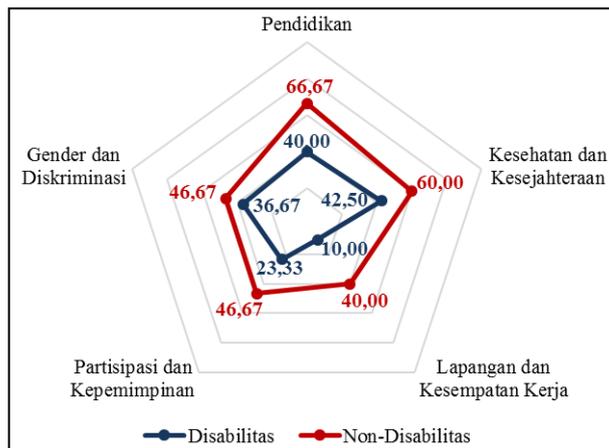
### C. Hasil dan Pembahasan

Temuan utama dari penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) penyandang disabilitas di Indonesia tahun 2018 sebesar 30,50. Capaian tersebut masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan IPP bukan penyandang disabilitas (52,00). Penghitungan indeks menurut status disabilitas ini masih memiliki kelemahan pada Dimensi Kesehatan dan Kesejahteraan, yaitu pada indikator persentase pemuda merokok dan persentase remaja yang sedang hamil, yang mana masih menggunakan angka nasional (belum didisegregasi menurut status disabilitas) sebagai pendekatan karena mengalami kendala ketika mencoba mendapatkan data tersebut. Meskipun demikian, angka yang dihasilkan dari penelitian ini sudah dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pembangunan pemuda antara kelompok penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas.



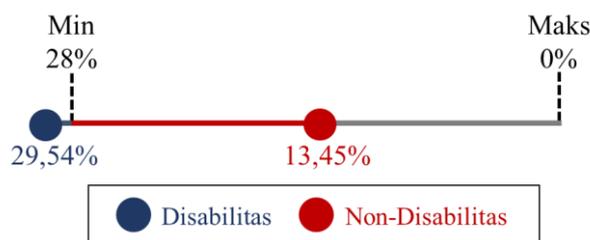
Gambar 2: IPP Menurut Status Disabilitas  
Sumber: BPS (diolah), 2018

Apabila dilihat lebih dalam, capaian indeks untuk semua dimensi pembentuk IPP bagi penyandang disabilitas masih rendah dibandingkan bukan penyandang disabilitas. Jika bagi pemuda bukan penyandang disabilitas capaian indeks tertinggi adalah pada dimensi Pendidikan, lain halnya bagi pemuda penyandang disabilitas. Capaian tertinggi kelompok ini justru pada dimensi Kesehatan dan Kesejahteraan, meskipun masih tetap tertinggal jika dibandingkan bukan penyandang disabilitas. Gambar 1 menunjukkan bahwa ketimpangan capaian indeks dimensi yang paling rendah antara dua kelompok ini adalah pada Dimensi Gender dan Diskriminasi yang mana terpaut 10 poin.



Gambar 3: Indeks Dimensi Menurut Status Disabilitas  
Sumber: BPS (diolah), 2018

Pada Gambar 1 terlihat bahwa Dimensi Lapangan dan Kesempatan Kerja untuk kelompok penyandang disabilitas memiliki capaian yang paling rendah. Pada dimensi ini pula terlihat *gap* yang paling tinggi antara penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas jika dibandingkan dengan keempat dimensi lainnya. Hal ini disebabkan masih sangat tingginya TPT pemuda penyandang disabilitas yang mencapai lebih dari 29 persen (Gambar 3). Angka ini bahkan lebih tinggi dari batas yang ditetapkan di Indonesia dimana mengacu pada TPT pemuda negara Arab Saudi, yang merupakan TPT pemuda tertinggi di dunia pada tahun 2015, yaitu 28 persen (Bappenas, 2017). Kondisi yang dialami oleh Indonesia ini sejalan dengan hasil dari kebanyakan studi yang menemukan bahwa penyandang disabilitas memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah dibandingkan bukan penyandang disabilitas (WHO dan World Bank, 2011).



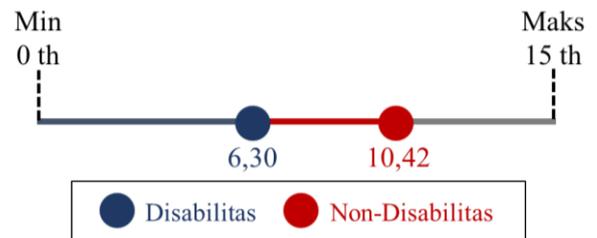
Gambar 4: Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda Menurut Status Disabilitas  
Sumber: BPS (diolah), 2018

Pemerintah sebenarnya telah memberi perhatian terhadap tingginya pengangguran di kalangan penyandang disabilitas. Hal ini

terbukti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa diskriminasi. Bahkan pada level internasional, Indonesia bersama dengan 19 negara lain yang tergabung dalam G20 (*Group of Twenty*) sepakat untuk mewajibkan tiap negara anggota memberi kuota khusus penyandang disabilitas dalam pekerjaan, baik di sektor publik maupun privat. Di Indonesia sendiri, kuota yang diberikan kepada penyandang disabilitas sebesar 1 persen (ILO dan OECD, 2018).

Agaknya, harapan pemangku kepentingan tersebut tidak berjalan mulus. Salah satu penyebabnya bisa jadi karena kuota yang diberikan tidak sebanding dengan jumlah penyandang disabilitas yang mencari kerja sehingga mereka yang di luar kuota tersebut harus bersaing dengan pencari kerja pada umumnya di pasar tenaga kerja. Jika seperti ini, modal manusia (*human capital*) tentu menjadi kunci utama yang harus diperhatikan. Becker (1964) dalam bukunya menyebutkan bahwa pendidikan adalah investasi penting dalam modal manusia. Jika melihat capaian pada Dimensi Pendidikan (Gambar 2), dapat dikatakan bahwa pemuda penyandang disabilitas masih cukup tertinggal dibandingkan bukan penyandang disabilitas. Berdasarkan Gambar 4, terlihat bahwa rata-rata lama sekolah pemuda penyandang disabilitas hanya 6,30 tahun atau setara lulusan SD. Hal ini sejalan dengan *The World Report on Disability* dimana anak penyandang disabilitas cenderung untuk tidak bersekolah dan memiliki tingkat kelulusan yang lebih rendah (WHO dan World Bank, 2011). Hal ini dapat terjadi karena aksesibilitas menuju sekolah bagi penyandang disabilitas yang kurang atau fasilitas sekolah yang seringkali tidak mendukung kebutuhan khusus para penyandang disabilitas (UNDESA, 2018). Penyebab lainnya adalah adanya stigma yang melekat pada masyarakat bahwa penyandang disabilitas tidak mampu mengikuti pelajaran sehingga mereka tidak seharusnya disekolahkan karena hanya akan menambah

tekanan untuk mereka dan membuat malu diri mereka sendiri (Grooce, 2004).



Gambar 5: Rata-rata Lama Sekolah Pemuda Menurut Status Disabilitas

Sumber: BPS (diolah), 2018

Keterbatasan fisik yang mereka punya ditambah dengan kurangnya latar belakang pendidikan tentu membuat pemuda penyandang disabilitas kalah jika harus bersaing dengan pemuda bukan penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan, terlebih pekerjaan yang layak, yang kemudian membuat TPT pemuda penyandang disabilitas sangat tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Hindun (2019) yang menemukan adanya hubungan negatif antara pendidikan dan tingkat pengangguran di Indonesia. Artinya, jika ingin tingkat pengangguran turun, maka langkah yang harus diambil adalah meningkatkan capaian pendidikan.

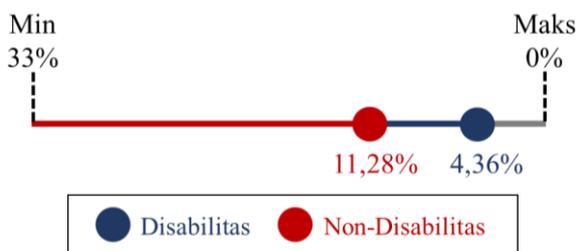


Gambar 6: Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih (*White Collar*) Menurut Status Disabilitas

Sumber: BPS (diolah), 2018

Penyebab lain yang perlu menjadi perhatian lebih untuk Dimensi Lapangan dan Kesempatan Kerja adalah masih sangat jarang pemuda yang bekerja dengan status berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh, dengan jenis jabatan *white collar* (tenaga profesional atau teknisi; kepemimpinan atau ketatalaksanaan; pejabat pelaksana atau tenaga tata usaha). Seperti yang terlihat pada Gambar 5, capaian pemuda penyandang disabilitas pada indikator tersebut masih 0 persen. Hal ini

sejalan dengan data ILO tahun 2017 yang menunjukkan bahwa dari 100 penduduk penyandang disabilitas di Indonesia, sekitar 59 di antaranya mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan layak. Hal ini membuat para penyandang disabilitas cenderung untuk bekerja di sektor informal (ILO, 2019)



Gambar 7: Persentase Perkawinan Usia Anak Menurut Status Disabilitas  
 Sumber: BPS (diolah), 2018

Hal lain yang juga menarik untuk diperhatikan adalah indikator perkawinan perempuan pada usia anak yang merupakan penyumbang nilai indeks untuk dimensi gender dan diskriminasi. Indikator ini merupakan satu-satunya indikator bagi kelompok penyandang disabilitas yang capaiannya lebih bagus jika dibandingkan bukan penyandang disabilitas (Gambar 6). Di sisi lain, kondisi ini justru bisa menjadi hal yang mengkhawatirkan karena penyandang disabilitas lebih cenderung untuk tidak menikah dibandingkan bukan penyandang disabilitas (Clark dan McKay, 2014). Teori ini sejalan dengan kondisi di Indonesia. Berdasarkan hasil olah data Susenas Maret 2018, perempuan usia subur penyandang disabilitas 1,89 kali lebih cenderung belum kawin dibandingkan bukan penyandang disabilitas (Tabel 2). Kondisi serupa juga terjadi di negara maju seperti Canada, dimana perempuan penyandang disabilitas lebih cenderung hidup sendiri karena keinginannya atau karena mereka tidak menemukan pasangan yang sepadan bagi mereka, dalam hal ini sesama penyandang disabilitas (Savage dan McConnell, 2015).

Tabel 2: Perempuan Usia Subur (15-49 Tahun) Menurut Status Disabilitas dan Status Perkawinan

Status	Status Perkawinan	Odds
--------	-------------------	------

Disabilitas	Belum Kawin (%)	Pernah Kawin (%)	Ratio
Disabilitas	38,96	61,04	1,89
Non-Disabilitas	25,23	74,77	

Sumber: BPS (diolah), 2018

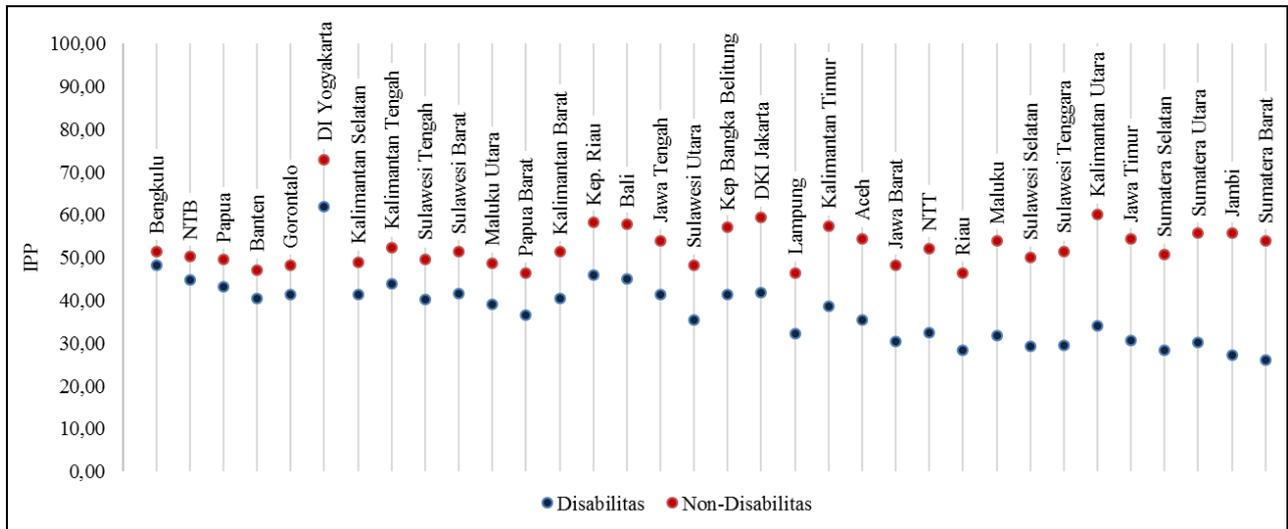
Jika dilihat pada level yang lebih rendah yaitu menurut provinsi, IPP penyandang disabilitas untuk semua provinsi lebih rendah dibandingkan IPP bukan penyandang disabilitas. Pada Gambar 7 terlihat bahwa IPP tertinggi adalah D.I. Yogyakarta, baik bagi penyandang disabilitas (62,00) maupun bukan penyandang disabilitas (72,83). Sebaliknya, IPP terendah bagi kelompok penyandang disabilitas adalah provinsi Sumatera Barat (26,00) dan IPP terendah bagi kelompok bukan penyandang disabilitas adalah provinsi Papua Barat (46,33). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa adanya perbedaan *gap* IPP penyandang disabilitas dan IPP bukan penyandang disabilitas antar provinsi di Indonesia.

Provinsi dengan *gap* indeks terendah adalah Bengkulu (6,47 persen), dengan IPP penyandang disabilitas sebesar 48,17 dan IPP bukan penyandang disabilitas sebesar 51,50. Dengan kata lain, pembangunan pemuda bukan penyandang disabilitas di Bengkulu sekitar 6 persen lebih baik dibandingkan pembangunan pemuda penyandang disabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa Bengkulu cukup perhatian terhadap pemerataan pembangunan pemuda antara penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas.

Sayangnya, capaian Bengkulu tersebut sangat kontras dengan dua provinsi sebelahnya yakni Sumatera Barat dan Jambi, yang merupakan dua provinsi dengan *gap* indeks tertinggi. Di Sumatera Barat, IPP penyandang disabilitas sebesar 26,00 sedangkan IPP bukan penyandang disabilitas sebesar 54,00 sehingga didapatkan *gap* indeks sebesar 51,85 persen. Tidak berbeda jauh dengan Sumatera Barat, IPP penyandang disabilitas di Jambi sebesar 27,17 sedangkan IPP bukan penyandang disabilitas sebesar 55,67 sehingga *gap* indeks untuk Jambi sebesar 51,20 persen. Artinya, pembangunan pemuda penyandang disabilitas di Sumatera Barat dan Jambi hanya setengah

dari pembangunan pemuda bukan penyandang disabilitas.

bukan penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari capaian indeks untuk semua dimensi



Gambar 8: Gap IPP Per Provinsi Menurut Status Disabilitas  
 Sumber: BPS (diolah), 2018

Berdasarkan fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa kemiripan budaya atau kedekatan letak geografis, seperti yang terjadi pada provinsi Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Barat, tidak serta merta membuat sikap masyarakat maupun pemerintah terhadap penyandang disabilitas di tiap wilayah tersebut sama. Kondisi ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Saravanabhavan (2001) bahwa sikap terhadap penyandang disabilitas antar budaya dan antar negara dapat berbeda, entah positif atau negatif. Hal tersebut tentu tidak dibenarkan mengingat pada hakikatnya penyandang disabilitas adalah manusia yang mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan manusia lain, dan hak-hak tersebut telah secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Ke depannya, diharapkan semua wilayah lebih memperhatikan kelompok penyandang disabilitas, baik pemuda maupun penduduk secara umum, agar pembangunan kelompok penyandang disabilitas setidaknya dapat setara dengan kelompok bukan penyandang disabilitas.

**D. Penutup**

**Kesimpulan:** Dari hasil penghitungan, penyajian, dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa pembangunan pemuda penyandang disabilitas di Indonesia untuk semua aspek belum setara dengan pembangunan pemuda

pembentuk IPP bagi penyandang disabilitas yang masih berada di bawah capaian pemuda bukan penyandang disabilitas, sehingga menyebabkan IPP penyandang disabilitas cukup jauh di bawah IPP bukan penyandang disabilitas. Adapun aspek yang perlu perhatian lebih adalah pembangunan di bidang lapangan dan kesempatan kerja bagi pemuda penyandang disabilitas.

Untuk semua provinsi di Indonesia, pembangunan pemuda penyandang disabilitas juga belum setara dengan pembangunan pemuda bukan penyandang disabilitas. Provinsi yang paling memperhatikan kesetaraan pembangunan pemuda antara penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas adalah Bengkulu. Sebaliknya, Jambi dan Sumatera Barat merupakan dua provinsi dengan ketimpangan pembangunan pemuda terbesar antara penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas.

**Rekomendasi:** Bagi pemangku kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah, diharapkan lebih memperhatikan kesetaraan pembangunan bagi kelompok pemuda penyandang disabilitas dalam segala aspek, khususnya aspek kesempatan dan lapangan kerja. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dapat membuat kebijakan terkait penambahan kuota khusus pekerjaan bagi pemuda penyandang disabilitas. Pemerintah bekerja sama dengan organisasi

lain di luar pemerintahan dapat membuka pintu bagi pemuda penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan seperti dengan membuat bursa kerja khusus bagi mereka. Dari segi pendidikan, diharapkan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dapat membuat kebijakan yang bisa mendorong atau menyemangati pemuda penyandang disabilitas untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, baik pendidikan formal maupun informal, yang nantinya dapat menjadi bekal para pemuda penyandang disabilitas untuk bersaing di pasar tenaga kerja.

Bagi peneliti berikutnya yang ingin melakukan kajian terkait pembangunan pemuda penyandang disabilitas, sangat disarankan menghitung IPP dengan seluruh indikator yang didisegregasikan menurut status disabilitas agar benar-benar menggambarkan seberapa jauh capaian pembangunan pemuda penyandang disabilitas. Akan sangat baik pula jika ke depannya dari hasil penelitian kuantitatif ini dilakukan penelitian mendalam secara kualitatif yang hasilnya nanti dapat memperkuat temuan atau hasil-hasil penghitungan dalam penelitian ini.

### Ucapan Terima Kasih

Kami ucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan penelitian ini, khususnya Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang telah mendukung kami dengan data yang akurat.

### Pustaka Acuan

- Becker, G.S. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. New York: Columbia University Press.
- Clarke, Harriet. & McKay, Stephen. (2014). *Disability Partnership, dan Parenting*, *Journal of Disability & Society* Vol. 29 No. 4 November 2014. London: Routledge.
- Grooce, Nora Ellen. (2004). *Adolescents and Youth with Disability: Issues and Challenges*, *Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal* Vol.15 No.2. 2014. Washington: The World Bank.
- Han, Sangjong. Koo, Dan Daehyun. Kim, Youngkyung. Kim, Seonghoon. Park, Joonhong. (2017). *Gap Analysis Based Decision Support Methodology to Improve Level of Service of Water Services*, *Journal of Sustainability* Vol.9 No. 9, September 2017. Switzerland: MDPI.
- Hindun, Hindun. (2019). *Impact of Education Level on Unemployment Rate in Indonesia*, *International Journal of Educational Research Review* Vol.4 No.3 Juli 2019. Turkey: IJERE.
- International Labour Organization (ILO) dan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2018). *Labour Market Inclusion of People with Disabilities*. Argentina: dipresentasikan pada pertemuan pertama *G20 Employment Working Group*.
- International Labour Organization (ILO). (2019). *Opening Doors to Employment for People with Disabilities*, [https://www.ilo.org/jakarta/info/public/fs/WCMS\\_720936/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/jakarta/info/public/fs/WCMS_720936/lang--en/index.htm), diakses 5 November 2019.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2009). *Pedoman Evaluasi dan Indikator Kinerja Pembangunan*, Jakarta: Kedeputusan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2017). *Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2017*, Jakarta: Bappenas.
- Offerdahl, Kate. Evangelides, Alicia. Powers, Maggie. (2014). *Overcoming Youth Marginalization*, New York City: Columbia Global Policy Initiative, Columbia University.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Jakarta: Kementerian Sosial.
- Saravanabhavan, Sheila. (2001). *Attitudes Toward Disabilities Across Cultures*, *Journal of Educational Practice and Theory* Vol. 23 No. 2. 2001. Australia: James Nicholas Publishers.
- Savage, Amber. & McConnell, David. (2015). The marital status of disabled women in Canada: a population-based analysis, *Scandinavian Journal of Disability Research* Vol.18. 2016. Canada: Routledge.
- Szumilas, Magdalena. (2010). *Explaining Odds Ratios*, *Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry* Vol. 19 No. 3, Agustus 2010. Canada: Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs Youth (UNDESA). (2018). *World Youth Report: Youth and the 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs Youth (UNDESA). *Youth With Disabilities*,

<https://www.un.org/development/desa/youth/youth-with-disabilities.html>, diakses 7 November 2019.

United Nations Development Programme (UNDP). (2018). *What Does It Mean To Leave No One Behind?*, Washington DC: UNDP.

United Nations Foundation, (2016). *Common Questions On The Sustainable Development Goals: What Does "No One Left Behind" Mean?*, <https://unfoundation.org/blog/post/common-questions-on-the-sustainable-development-goals-what-does-no-one-left-behind-mean/>, diakses 6 November 2019.

Washington Group. (2011). *Washington Group-Extended Question Set on Functioning*, Luxembourg: Washington Group on Disability.

WHO & World Bank. (2011). *World Report on Disability*. Switzerland: WHO Press.